

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PROSEDUR PEMBAYARAN PAJAK TERHADAP
KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR DINAS PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN BANTAENG**

**SUGIATI.K
105720 4006 12**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2016

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Sugiati. K
Judul Skripsi : Efektivitas Prosedur Pembayaran Pajak Terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantaeng
NIM : 105720 4006 12
Jurusan : Manajemen
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Telah di seminar hasilkan dan di uji pada hari jum'at 23 September 2016

Makassar, 23 September 2016

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II



Drs. H. Sultan Sarda, MM

Irianto Sulaiman, SE., MM

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah
Makassar

Ketua Jurusan
Manajemen



Dr. H. Mahmud Nuhung, MA
NBM : 497 794



Moh. Aris Pasigai, SE., MM
NBM : 109 3483

ABSTRAK

Sugiati K. 2016. Efektivitas Prosedur Pembayaran Pajak Terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantaeng. Pembimbing H. Sultan Sarda dan Irianto Sulaiman.

Penelitian ini membahas tentang efektivitas prosedur pembayaran pajak terhadap kinerja pegawai pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantaeng. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan studi pustaka. Metode analisis data yang digunakan yakni analisis deskriptif guna mengetahui efektivitas pembayaran pajak.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah 1) Berdasarkan perhitungan efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantaeng terhadap kinerja pegawai menunjukkan bahwa dari kedelapan kecamatan di Kabupaten Bantaeng terlihat bahwa terjadi peningkatan penerimaan pajak yang ditunjukkan oleh penerimaan tahun 2014 ke tahun 2015 dimana rata-rata penerimaan setiap Kecamatan mengalami kenaikan penerimaan tahun 2014 sebesar 89% yakni tahun 2014 rata-rata penerimaan 95,2% dan meningkat pada tahun 2015 menjadi 110,5%. 2) Pencapaian penerimaan pajak bumi dan bangunan yang terealisasi cukup menunjukkan bahwa kinerja pegawai dalam menerapkan sistem penerimaan pajak efektif. Hal tersebut diwakilkan dengan tidak adanya realisasi penerimaan dibawah 50%. Dengan adanya peningkatan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan tentunya memberikan pengaruh terhadap pendapatan asli daerah dikategorikan sangat baik apabila rasio yang dicapai diatas 50%. Dari hasil perhitungan ini kontribusi terbesar diberikan oleh Kecamatan Bissapuyaitu sebesar 102,7% yang menurut kriteria berarti sangat baik.

Kata Kunci: Pajak, Dinas Pendapatan Daerah.

KATA PENGANTAR



Asalamu Alaikum Wr. Wb

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi tentang “Efektifitas Prosedur Pembayaran Pajak Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantaeng”.

Skripsi ini telah penulis susun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan skripsi ini. Untuk itu penulis menyampaikan banyak terimah kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini, oleh karena itu penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE.MM Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah
2. Bapak Dr. H. Mahmud Nuhung, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Drs. H. Sultan Sarda, MM selaku pembimbing I yang senantiasa memberikan bantuan berupa tenaga dan pikiran serta meluangkan

waktunya dengan keikhlasan untuk membimbing dan memberi petunjuk dalam menyusun skripsi ini .

4. Bapak Irianto Sulaiman, SE. MM, selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan petunjuk, bimbingan dan saran – saran selama menyusun skripsi.
5. Para Dosen dan karyawan dalam lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar Terkhusus kepada dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan bantuannya kepada penulis selama kuliah,
6. Armawansyah, S.Sos. MM Selaku Kepala Bidang Dinas Pendapatan Daerah atas kesediaannya menerima dan memberikan data serta informasi kepada penulis untuk keperluan penyusun skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen beserta asisten dan segenap staf karyawan dan karyawati Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak membantu dan membekali penulis dengan berbagai ilmu selama mengikuti perkuliahan sampai akhir penulisan skripsi.
8. Bapak dan Ibu tercinta yang telah memberikan motivasi dan do'anya selama penulis menjalankan perkuliahan, serta adekku, terima kasih atas segala bantuannya.
9. Rekan – rekan Mahasiswa Jurusan Manajemen. 2.12, terkhusus kepada Elnawari, Sri Amriani, yang telah banyak membantu penulis dan selalu bersama dalam senang maupun duka dalam kehidupan kampus unismuh.

Terlepas dari semua itu, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya, Oleh

karena itu dengan tangan terbuka saya menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar penulis memperbaiki skripsinya.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi tentang: “Efektivitas Prosedur Pemayaran Pajak Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantaeng” dapat memberikan manfaat maupun inspirasi terhadap pembaca, amin

Walaikum Salam Wr.Wb.

Makassar, 25 Agustus 2016

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Tujuan	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
A. Pajak.....	5
B. Jenis Pajak	6
C. Konsep Efektivitas	8
D. Konsep Kinerja	14
E. Kerangka Pikir	17
F. Hipotesis	18
BAB III METODE PENELITIAN	19
A. Waktu Dan Tempat Penelitian	19
B. Jenis Dan Sumber Data	19
C. Definisi Operasional Variabel.....	20
D. Metode Pengumpulan Data.....	20
E. Metode Analisis Data	21
BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	22

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	22
B. Landasan Hukum.....	26
C. Maksud Tujuan	28
D. Visi Dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantaeng	30
E. Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah.....	32
F. Stuktur Organisasi Dispenda Kabuupaten Bantaenag.....	34
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
 A. Sistem Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Bantaeng	41
 B. Efektivitas Pembayaran Pajak (PBB) Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Pendapatan Daearah Kabupaten Bantaeng.....	45
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	51
 A. Kesimpulan	51
 B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap organisasi mempunyai tujuan baik tujuan umum maupun khusus, jangka pendek maupun jangka panjang, yang akan direalisasikan dengan menggunakan berbagai sumberdaya atau faktor produksi yang ada. Pengelola tidak akan dapat mencapai tujuan secara optimal bilamana penggunaan sumberdaya atau faktor produksi dilakukan tidak dengan proses yang benar.

Manajemen memegang peranan sangat penting, sebab manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya organisasi dan proses penggunaan semua sumberdaya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. (Stoner, 2004: 10).

Sedangkan efektivitas berbicara tentang visi dan arah, berhubungan dengan memfokuskan energi organisasi pada arah tertentu (VeitzhalRivai, 2003: 147). Efektivitas organisasi merupakan suatu indeks mengenai hasil yang dicapai terhadap tujuan organisasi.

Demikian halnya dengan kinerja merupakan gambaran tentang pencapaian atau target, pelaksanaan program, usaha, dan kebijakan yang dilakukan untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan dalam kelompok atau organisasi (Mahrusdalam Alannita dan I Gusti, 2014). Kinerja karyawan dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kinerja karyawan yang tinggi dapat meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kinerja yang lebih tinggi mengandung arti terjadinya peningkatan efisiensi, eektivitas atau kualitas

yang lebih tinggi dari penyelesaian serangkaian tugas yang dibebankan kepada karyawan dalam perusahaan atau organisasi (Lisdawati dan Irma, 2012).

Kinerja karyawan yang baik apabila memiliki keahlian (skill) yang tinggi, bersedia bekerja apabila mendapat imbalan (gaji) atau diberi sesuai dengan kesepakatan, serta memiliki masa depan dan harapan yang baik. Keberhasilan kinerja karyawan sangat dipengaruhi oleh faktor beberapa faktor. Dimulai dari sistem manajemen yang diterapkan sampai pada penggunaan kecanggihan teknologi yang akan membantu perusahaan untuk menghasilkan informasi yang lebih akurat dan tepat waktu dalam pengambilan keputusan yang efektif.

Kinerja pegawai dan organisasi dapat diperbaiki melalui penerapan manajemen yang baik disertai penggunaan teknologi informasi yang dalam penyusunan dan pengelolaan keuangan. Demikian pula pada Kantor Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Bantaeng tentunya memerlukan suatu sistem manajemen yang mengatur proses pengklasifikasian, pengukuran, dan pengungkapan seluruh transaksi keuangan yang disebut dengan sistem akuntansi pada pembayaran pajak dari masyarakat.

Partisipasi manajemen dalam pembayaran pajak berpengaruh terhadap pengembangan organisasi. Pada dasarnya kecanggihan manajemen berhubungan dengan kecanggihan teknologi dalam perencanaan, pengendalian dan pengevaluasian aplikasi yang digunakan dalam perusahaan atau organisasi. Partisipasi manajemen akan mendorong pengguna untuk mengembangkan sikap positif terhadap sistem informasi akuntansi. Aleqab dan Ismail dalam Alannita dan I. Gusti (2014) menemukan adanya hubungan yang positif antara kecanggihan manajemen dengan sistem informasi akuntansi.

Dukungan dari manajemen mempengaruhi kinerja organisasi dan karyawan. Tanggung jawab manajemen yaitu menyediakan pedoman umum bagi kegiatan sistem informasi akuntansi. Manajemen memiliki tugas membandingkan informasi kinerja saat ini mengenai anggaran, prakiraan, dan tolak ukur yang digunakan untuk mengukur sejauh mana tujuan dan sasaran yang dicapai organisasi dengan melihat hasil dan kondisi yang terjadi.

Salah satu permasalahan yang serius dalam organisasi adalah masalah karyawan dan kinerjanya. Masalah-masalah yang terkait dengan kinerja karyawan perlu mendapat perhatian yang serius. Karyawan mempunyai kekuatan-kekuatan yang senantiasa melahirkan konsekuensi-konsekuensi behaviour (tingkah laku).

Berdasarkan uraian pada paragraf-paragraf sebelumnya, maka yang menjadi salah satu alasan peneliti tertarik untuk meneliti untuk melihat efektivitas manajemen pembayaran pajak terhadap kinerja karyawan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantaeng yang disebabkan rendahnya kinerja sumber daya manusia dalam organisasi.

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang yang dikemukakan, maka dalam penelitian ini penulis akan mengemukakan permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu “bagaimana efektivitas prosedur pembayaran pajak (PBB) terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantaeng?”

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas manajemen pembayaran

pajak terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantaeng.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, dapat memperkaya konsep atau teori yang menyokong perkembangan ilmu pengetahuan ekonomi, khususnya yang terkait dengan perpajakan.
2. Manfaat praktis, dapat memberikan masukan yang berarti bagi pembuatan laporan keuangan, khususnya terkait dengan manajemen pembayaran pajak.
3. Kebijakan, memberikan masukan dan informasi tambahan bagi perusahaan yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantaeng terkait manajemen pembayaran pajak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pajak

Menurut Nurmantu (2005:1), definisi pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasar undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008, pajak merupakan iuran rakyat yang dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

Selanjutnya menurut Sumarsan (2010:4), definisi pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Beberapa definisi yang telah disajikan dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat dalam pengertian pajak antara lain sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (Wajib Pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak/administrator pajak).
2. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum

pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik secara rutin maupun pembangunan.

3. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para Wajib Pajak.
4. Pajak digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.
5. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
6. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Menurut Sumarsan (2010:7), agar tidak menimbulkan masalah pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil,
2. Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian,
3. Pemungutan pajak harus efisien,
4. System pemungutan pajak harus sederhana.

B. Jenis Pajak

Marsyahrul (2006: 4) menyatakan bahwa perbedaan jenis pajak yang dibagi dalam golongan-golongan dapat didasarkan atas sifat-sifat tertentu yang ada dalam masing-masing pajak ataupun atas ciri-ciri tertentu pada setiap

pajak. Ciri-ciri tertentu bersamaan dari setiap jenis pajak dimasukkan dalam satu golongan sehingga dapat digolongkan sebagai berikut.

1. Pajak Langsung dan Tidak Langsung

Pajak langsung adalah pajak-pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan, tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, dan dikenakan berulang-ulang pada waktu tertentu. Contoh dari pajak ini adalah Pajak Penghasilan Pasal 25, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan lain-lain.

Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak-pajak yang tidak dikenakan berulang-ulang pada waktu tertentu dan pada akhirnya dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya dari pajak ini adalah Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa.

2. Pajak Pusat (Negara)

Yaitu pajak-pajak yang wewenang pemungutannya ada ditangan pemerintah pusat, di mana dari hasil pemungutannya tersebut digunakan untuk kepentingan pembiayaan negara pada umumnya. Yang termasuk dalam Pajak Pusat ini adalah Pajak Penghasilan, Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

3. Pajak Subyektif dan Pajak Obyektif

Pajak Subyektif yaitu pajak yang pemungutannya berpangkal kepada diri orangnya, dimana keadaan diri Wajib Pajak yang bersangkutan dapat memengaruhi besar kecilnya pajak yang harus dibayar. Contoh keadaan status perkawinan dari Wajib Pajak yang telah kawin atau belum dan jumlah anak yang menjadi tanggungannya akan memengaruhi besar kecilnya pajak yang

harus dibayar. Sedangkan Pajak Obyektif adalah pajak-pajak yang pemungutannya berpangkal pada obyeknya, di mana pajak-pajak ini dipungut karena keadaan, perbuatan-perbuatan, dan kejadian yang dilakukan atau yang akan terjadi dalam wilayah negara dengan tidak mengindahkan tempat kediamannya ataupun sifat subyeknya. Contoh dari pajak ini adalah cukai rokok, pajak undian-undian berhadiah, dan lain-lain.

C. Konsep Efektivitas

Setiap organisasi mempunyai tujuan baik tujuan umum maupun khusus, jangka pendek maupun jangka panjang, yang akan direalisasikan dengan menggunakan berbagai sumberdaya atau faktor produksi yang ada. Pengelola tidak akan dapat mencapai tujuan secara optimal bilamana penggunaan sumberdaya atau faktor produksi dilakukan tidak dengan proses yang benar.

Manajemen memegang peranan sangat penting, sebab manajemen merupakan “proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya organisasi dan proses penggunaan semua sumberdaya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan” (Stoner, 2004: 10). Efektivitas berbicara tentang visi dan arah, berhubungan dengan memfokuskan energi organisasi pada arah tertentu (VeitzhalRivai, 2003: 147).

Efektivitas organisasi merupakan suatu indeks mengenai hasil yang dicapai terhadap tujuan organisasi. Suatu proses adalah cara sistematis untuk melakukan pekerjaan. Manajemen didefinisikan sebagai proses karena semua manajer, tanpa memperdulikan kecakapan atau keterampilan khusus, mereka harus melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan-tujuan yang mereka inginkan (Hani Handoko, 2007: 8).

Ada dua konsep utama untuk menilai manajer dan organisasi (Stoner, 2004: 9) yaitu efisiensi dan efektivitas. Efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar, sedangkan efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih sasaran yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan kinerja (*performance*) tersebut Peter Drucker (dalam Stoner, 2004: 9) menyebutkan bahwa efisiensi adalah melakukan pekerjaan dengan benar, sedangkan efektivitas adalah melakukan pekerjaan yang tepat.

Peranan efektivitas manajemen biasanya diakui sebagai faktor paling penting dalam keberhasilan jangka panjang suatu organisasi. Keberhasilan diukur dalam bentuk pencapaian sasaran organisasi. Manajemen dapat didefinisikan sebagai proses penetapan sasaran organisasi dan melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut secara efisien baik dalam bentuk penggunaan tenaga manusia, bahan, dan sumber daya modal.

Keberhasilan organisasi dapat diukur dengan konsep efektivitas (Richard M. Steers, 2005:16). Yang dimaksud efektivitas adalah sesuatu yang menunjukkan tingkatan keberhasilan kegiatan manajemen di dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Komaruddin Sastradipoera, 1989:126). Stephen P. Robbins (2002: 22) mengartikan efektivitas sebagai suatu yang menunjukkan tingkatan keberhasilan kegiatan manajemen di dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengertian efektivitas menurut para ahli pada hakekatnya memiliki kesamaan makna yaitu menitikberatkan pada tingkat keberhasilan dan pencapaian tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, Richard M. Steers (2005:3-5) mengemukakan tiga

konsep yang dapat digunakan untuk meneliti efektivitas kegiatan organisasi untuk melihat apakah organisasi dapat mencapai sasaran dan tujuannya, yaitu:

1. Konsep optimisasi tujuan.
2. Konsep perspektif sistem.
3. Tekanan terhadap perilaku.

Ketiga konsep tersebut sebenarnya saling terkait, namun dalam penelitian untuk mengetahui efektivitas manajemen pembayaran pajak pada Kantor Dispendaan diukur melalui penilaian efektivitas dengan menggunakan konsep optimalisasi tujuan, yaitu melihat sejauhmana tujuan-tujuan atau sasaran manajemen pembayaran pajak pada Kantor Dispenda dapat dicapai. Hal ini sesuai dengan ukuran untuk efektivitas organisasi dari Richard M. Steers (2005:47) yang penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Efektivitas keseluruhan, yaitu sejauhmana organisasi melaksanakan seluruh tugas pokoknya atau mencapai semua sasarannya.
2. Produktivitas, yaitu kuantitas atau volume dari produk atau jasa pokok yang dihasilkan organisasi. Dapat diukur menurut tiga tingkatan: tingkat individual, kelompok dan keseluruhan organisasi.
3. Efisiensi, yaitu sesuatu yang mencerminkan perbandingan antara beberapa aspek unit terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut.
4. Laba, diartikan yaitu penghasilan atas penanaman modal yang dipakai untuk menjalankan organisasi. Jumlah dari sumberdaya yang masih tersisa setelah semua biaya dan kewajiban dipenuhi, kadang-kadang dinyatakan dalam persentase.

5. Pertumbuhan, yaitu penambahan dalam hal-hal seperti tenaga kerja, fasilitas yang ada dalam organisasi, harga, penjualan, laba, modal, bagian pasar, dan penemuan-penemuan baru. Suatu perbandingan antara keadaan organisasi sekarang dengan keadaan masa sebelumnya.
6. Stabilitas, yaitu pemeliharaan struktur, fungsi, dan sumberdaya sepanjang waktu, khususnya dalam periode-periode sulit.
7. Semangat kerja, yaitu kecenderungan anggota organisasi berusaha lebih keras mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang meliputi perasaan terikat, kebersamaan tujuan, dan perasaan memiliki.
8. Kepuasan, yaitu kompensasi atau timbal balik positif yang dirasakan seseorang atas peranan atau pekerjaannya dalam organisasi.
9. Penerimaan tujuan organisasi, yaitu diterimanya tujuan-tujuan organisasi oleh setiap pribadi dan oleh unit-unit dalam organisasi. Kepercayaan mereka bahwa tujuan organisasi tersebut adalah benar dan layak.
10. Keterpaduan, konflik-konflik, kekompakan, yaitu dimensi ber kutub dua. Yang dimaksud kutub keterpaduan adalah fakta bahwa para anggota organisasi saling menyukai satu sama lain, bekerja sama dengan baik, berkomunikasi sepenuhnya dan secara terbuka, dan mengkoordinasikan usaha kerja mereka. Pada kutub yang lain terdapat organisasi penuh pertengkar an baik dalam bentuk kata-kata maupun secara fisik, koordinasi yang buruk, dan berkomunikasi yang tidak efektif.
11. Keluwesan adaptasi, yaitu kemampuan organisasi untuk mengubah standar operasi prosedur (SOP) guna menyesuaikan diri terhadap perubahan.

12. Penilaian oleh pihak luar, yaitu penilaian mengenai organisasi atau unit organisasi oleh mereka (individu atau organisasi) dalam lingkungannya, yaitu pihak-pihak dengan siapa organisasi ini berhubungan.

Penilaian efektivitas manajemen pembayaran pajak pada Kantor Dispendaakan diukur menggunakan konsep optimalisasi tujuan, yaitu melihat sejauhmana tujuan-tujuan atau sasaran yang dapat dicapai. Hal ini sesuai dengan tolok ukur untuk efektivitas organisasi dari Richard M. Steers (1995: 4) yaitu antara lain efektivitas keseluruhan, produktivitas, efisiensi, laba, pertumbuhan, stabilitas, semangat kerja, kepuasan, penerimaan tujuan organisasi, keterpaduan, keluwesan adaptasi dan penilaian oleh pihak luar yang menggambarkan kinerja dari organisasi tersebut. Sesuai dengan penelitian ini, maka yang menjadi tolok ukur kinerja pegawai Kantor Dinas Pendapatan Daerah, dalam efektivitas manajemen pembayaran pajak antara lain tujuan, efisiensi, laba, pertumbuhan, stabilitas, semangat kerja, kepuasan, penerimaan tujuan organisasi, keterpaduan, keluwesan adaptasi dan penilaian oleh pihak luar yang menggambarkan kinerja dari organisasi tersebut.

Kantor Dinas Pendapatan Daerah sebagai instansi pemerintah, juga sebagai lembaga sumber pembiayaan dan pengelola pendapatan daerah, maka banyak pihak-pihak yang berkepentingan terhadap lembaga tersebut, oleh karena itu Kantor Dinas Pendapatan Daerah membutuhkan manajemen. Terdapat tiga alasan utama diperlukannya manajemen (Hani Handoko, 2007:6):

1. Untuk mencapai tujuan.
2. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan.

3. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang tinggi.

Di sisi lain manajemen dapat berarti pencapaian tujuan melalui pelaksanaan fungsi-fungsi tertentu. Fungsi manajemen yang dikemukakan tersebut meliputi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian. Pengertian dari masing-masing fungsi tersebut.

Perencanaan (*planning*) menunjukkan bahwa manajer berfikir melalui sasaran-sasaran dan kegiatan mereka sebelumnya, bahwa kegiatan-kegiatan mereka lebih didasarkan pada suatu metode, rencana, atau pikiran logis ketimbang pada praduga. Langkah-langkah dalam perencanaan : adalah 1) pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi dan 2) penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metoda, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.

Pengorganisasian (*organizing*) adalah proses pengaturan dan pengalokasian kerja, wewenang, dan sumberdaya manusia anggota organisasi sehingga mereka dapat mencapai tujuan organisasi secara efisien. Kepemimpinan (*leading*) adalah mencakup hal mengarahkan (*directing*), hal mempengaruhi (*influencing*), memotivasi (*motivating*) karyawan untuk menjalankan tugas-tugas pokok.

Pengendalian (*controlling*) adalah kegiatan manajer harus memastikan bahwa tindakan para anggota organisasi benar-benar membawa organisasi ke arah tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi pengendalian dari manajemen mencakup empat unsur utama: (1). Menetapkan standar kinerja, (2), Mengukur kinerja yang sedang berjalan, (3), Membandingkan kinerja ini dengan standar yang telah ditetapkan, (4), Mengambil tindakan untuk memperbaiki kalau ada penyimpangan (Stoner, 1994: 11).

D. Konsep Kinerja

Menurut Gary Siegel dan Helene (dalam Mulyadi, 2001: 415) mendefinisikan penilaian kinerja sebagai berikut “Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional, bagian organisasi, dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya”. Karenanya organisasi pada dasarnya dijalankan oleh manusia, maka penilaian kinerja sesungguhnya merupakan penilaian atas perilaku manusia dalam melaksanakan peran yang mereka mainkan di dalam organisasi.

Tujuan pokok penilaian kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan. Standar perilaku dapat berupa kebijakan manajemen atau rencana formal yang dituangkan dalam anggaran.

Menurut Mulyadi (2001:416), penilaian kinerja dimanfaatkan oleh manajemen untuk :

1. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara maksimal
2. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan.
3. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan.
4. Menyediakan umpan balik para karyawan mengenai bagaimana atasan menilai kinerja mereka.
5. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan.

Pengukuran-pengukuran yang digunakan untuk menilai kinerja tergantung pada bagaimana unit organisasi akan dinilai dan bagaimana sasaran akan dicapai. Sasaran yang ditetapkan pada tahap perumusan strategi dalam sebuah proses manajemen strategis harus betul-betul digunakan untuk mengukur kinerja organisasi selama masa implementasi strategi.

Tujuan atau target dari organisasi maka jalannya organisasi terarah, serta memberikan motivasi bagi setiap individu dalam organisasi untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Gibson (1997: 164) mendefinisikan tujuan sebagai keterangan ukuran keberhasilan yang ingin dicapai. Tujuan membantu seseorang menyusun suatu rencana yang mengubah harapan dan keinginan menjadi kenyataan.

Suatu kegiatan disebut efisien, pertama dengan input tertentu dapat dicapai output maksimal, kedua dengan input minimal dapat dicapai output tertentu. Tingkat efisiensi semakin tinggi apabila semakin sedikit sumber daya, dana, sarana dan prasarana yang digunakan dalam menghasilkan barang dan jasa tertentu (Hasibuan 2003: 160). Setiap organisasi berusaha mencapai tingkat efisiensi yang paling tinggi. Yang dimaksud dengan efisiensi di sini adalah suatu perbandingan (*rasio*) antara tindakan-tindakan yang dilakukan (*input*) dengan hasil-hasil yang diperoleh (*output*) (Hasibuan,2003:161).Mulyono (2002: 61) mengatakan modifikasi variabel penentu produktivitas organisasi dapat dikembangkan dan diarahkan untuk mencapai tujuan yaitu:

1. Pola tingkah laku kerja, segala aktivitas organisasi yang memperlihatkan keikutsertaan dan keterlibatan individu-individu di dalamnya.
2. Pelaksanaan tugas, yaitu evaluasi terhadap prestasi individu mengenai tugas,

kewajiban dan tanggung jawabnya.

3. Efektivitas organisasi, yaitu indeks mengenai hasil yang dicapai terhadap tujuan organisasi.

Berdasarkan pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa produktivitas merupakan perbandingan antara keluaran dan masukan serta mengutarakan cara pemanfaatan terhadap sumber-sumber dalam memproduksi suatu barang dan jasa.

Indikator penilaian kinerja selain diuraikan di atas adalah pertumbuhan modal. Modal merupakan dana yang diperlukan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan sehari-hari (Sutrisno, 2001 : 43). Modal kerja merupakan salah satu aktiva yang sangat penting dalam perusahaan. Karena tanpa modal kerja perusahaan tidak dapat memenuhi kebutuhan dana untuk menjalankan aktivitasnya. Masa perputaran modal kerja, yakni sejak kas ditanamkan pada elemen-elemen modal kerja hingga menjadi kas lagi, adalah kurang dari satu tahun atau berjangka pendek. Masa perputaran modal kerja ini menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan modal kerja tersebut. Pertumbuhan modal BKM dapat dilihat melalui penambahan atau pengurangan modal dari perolehan laba atau rugi yang diperoleh oleh setiap organisasi tersebut.

Laba terjadi apabila penghasilan yang diperoleh dalam suatu periode lebih besar dibandingkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan, sebaliknya rugi akan timbul bila pendapatan lebih rendah dibandingkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan (Sutrisno, 2001 :12). Sesuai dengan penelitian ini, maka yang menjadi tolok ukur kinerja Kantor Dinas Pendapatan Daerah yaitu tujuan, efisiensi, laba, pertumbuhan, stabilitas, semangat kerja, kepuasan, penerimaan tujuan organisasi,

keterpaduan, keluwesan adaptasi dan penilaian oleh pihak luar yang menggambarkan kinerja dari organisasi tersebut.

Seorang manajer yang efisien adalah manajer yang mencapai keluaran, atau hasil yang memiliki sifat-sifat yang dikehendaki masukan (tenaga kerja, bahan, dan waktu) yang dipergunakan untuk mencapai keluaran. Manajer yang berkemampuan untuk memperkecil biaya sumberdaya yang dipergunakannya untuk mencapai tujuan adalah manajer yang bertindak dengan efisien (Stoner, 2004 : 9).

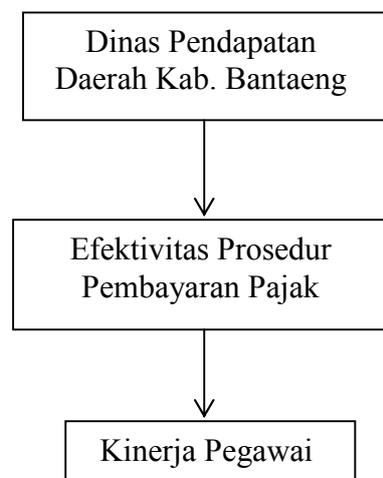
Pertumbuhan modal di sisi lain, merupakan salah satu indikator dari konsep optimalisasi tujuan. Modal kerja merupakan harta yang dapat dengan segera dijadikan uang kas dan digunakan oleh perusahaan untuk membiayai keperluan operasi sehari-hari (MurtiSumarni, 2006: 260). Modal kerja merupakan salah satu aktiva yang sangat penting dalam perusahaan, karena tanpa modal kerja perusahaan tidak dapat memenuhi kebutuhan dana untuk menjalankan aktivitasnya.

E. Kerangka Pikir

Dinas Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memberi gambaran seluruh aktivitas pemerintahan dan pembangunan daerah kabupaten/kota, yang dibiayai berdasarkan sumber-sumber penerimaan dan kebijakan pembelanjaan dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan dan pembangunan daerah. Karena itu APBD sering diartikan sebagai pernyataan tentang perkiraan dan pengeluaran daerah yang diharapkan terjadi dalam satu tahun ke depan berdasarkan kinerja masa lalu.

Pembayaran pajak seluruh masyarakat Kabupaten Bantaeng dibayarkan pada Kantor Dinas Pendapatan dan Belanja Daerah yang menjadi salah satu kewenangannya. Oleh karena itu agar pegawai dapat memberikan kinerja yang maksimal maka Kantor Dinas Pendapatan Daerah membutuhkan sistem manajemen dalam penerimaan pembayaran pajak masyarakat.

Prosedur pembayaran PBB yang digunakan oleh Dinas Pendapatan Daerah tentunya harus mampu mengatasi berbagai keluhan pada saat pelayanan dan penerimaan pembayaran pajak. Adanya manajemen yang baik dan sesuai tentu akan memberikan manfaat yang positif pula, seperti peningkatan kinerja pegawai. Gambaran hubungan tersebut dapat dilihat melalui kerangka analisis sebagai berikut :



Gambar 1. Gambar Bagan Kerangka Pikir

F. Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka dapatlah diberi hipotesa adalah “diduga efektivitas prosedur pembayaran pajak mempengaruhi kinerja pegawai pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantaeng”.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Pengumpulan data dan informasi sebagai penunjang utama dalam proposal ini, maka penulis memilih objek penelitian bertempat di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantaeng yang direncanakan dilaksanakan kurang lebih 2 (dua) bulan yakni pada bulan April-Juni 2016.

B. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang dikumpulkan oleh penulis adalah:

1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini terdiri atas 2 (dua) yaitu:

- a. Data kuantitatif yaitu data yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk angka-angka seperti: jumlah pegawai, serta data lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
- b. Data kualitatif yaitu data yang diperoleh dari perusahaan melalui keterangan-keterangan secara tertulis, seperti sejarah atau gambaran umum perusahaan, struktur organisasi, dan informasi tentang jenis pelatihan yang pernah dilaksanakan.

2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dengan mengadakan pengamatan secara langsung dan wawancara dengan pimpinan perusahaan dan pegawai lainnya.

- b. Data sekunderyaitu berupa bahan-bahan dokumentasi perusahaan seperti sejarah berupa bahan-bahan, struktur organisasi, jumlah karyawan, serta data lainnya yang ada hubungannya dengan tujuan organisasi.

C. Definisi Operasional Variabel

1. Dinas Pendapatan Kabupaten Bantaeng yaitu instansi daerah yang mengatur dan memungut pendapatan daerah yang meliputi pajak maupun retribusi daerah Kabupaten Bantaeng.
2. Efektivitas Prosedur Pembayaran Pajak yaitu keefektifan prosedur yang diterapkan oleh pemerintah daerah dalam proses pembayaran pajak yang harus dilalui oleh masyarakat wajib pajak.

D. Metode Pengumpulan Data

Banyak metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data dalam sebuah penelitian. Metode pengumpulan data pada prinsipnya berfungsi untuk mengungkapkan variabel yang akan diteliti. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantaengmelalui:

a. Observasi

Metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas yang berhubungan dengan manajemen pembayaran pajak pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantaeng.

b. Wawancara

Penulis melakukan tanya jawab dan diskusi secara langsung dengan pihak perusahaan, khususnya dengan bagian yang berhubungan dengan objek penelitian.

2. Studi Pustaka (*Library Research*)

Dilakukan dengan cara mencari dan membaca literature-literature yang ada hubungannya dengan materi penulisan.

E. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Analisis Deskriptif, digunakan untuk menjelaskan efektifitas pemungutan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantaeng.
2. Analisis Efektivitas, digunakan untuk mengetahui efektifitas pemungutan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantaeng, yaitu dengan menggunakan rasio perbandingan antara realisasi anggaran pajak dengan anggaran pemungutan pajak yang ditetapkan dengan dikali 100%, guna mengetahui tingkat efektifitas (hasil) yang dicapai untuk mencapai tujuan. Berikut rumusan rasio efektifitas pemungutan pajak daerah yang digunakan.

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Pendapatan}{Target\ Pendapatan} \times 100\%$$

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sebelum terbentuknya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantaeng, Dinas Pasar, Dinas Air Minum dan Dinas Penghasilan Daerah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 155/Kep/A/V/1973 Tanggal 24 Mei 1973 terdiri dari beberapa Sub Dinas Terminal Angkutan, Sub Dinas Pngelolaan Tanah Pasir, Sub Dinas Taman Hiburan Rakyat, Sub Dinas Pemeriksaan Kendaraan Tidak Bermotor dan Sub Dinas Administrasi. Adanya Keputusan Walikota yang terdapat dalam Keputusan Daerah Nomor 74/S/Kep/A/V1977 Tanggal 1 April 1977 bersama dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 3/12/43 Tanggal 9 September 1975 dan Instruktur Menteri, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan tanggal 25 Oktober 1975 Nomor Keu/3/22/33 tentang pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantaengtelah disempurnakan dan ditetapkan perubahan namanya menjadi Dinas Penghasilan Daerah yang kemudian menjadi unit-unit yang menangani sumber-sumber keuangan daerah seperti Dinas Perpajakan.

Dinas Pasar dan Sub Dinas Pajak Parkir dan semua Sub-sub Dinas dalam unit penghasilan daerah yang tergabung dalam unit penghasilan daerah dilebur dan dimasukkan pada unit kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantaeng. Seiring dengan adanya perubahan secara otomatis namaDinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantaeng berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

B. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantaeng

1. Visi

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantaeng, yaitu prima dalam Pelayanan dan Unggul dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah.

2. Misi

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantaeng, yaitu sebagai berikut:

- a. Menggali sumber-sumber PAD secara optimal.
- b. Menyusun/merevisi kembali Peraturan Daerah.
- c. Meningkatkan pengawasan pengelolaan pendapatan daerah.
- d. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia.
- e. Melakukan evaluasi secara berkala.
- f. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai.
- g. Meningkatkan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan agar terbinakesadaran Wajib Pajak/Wajib Retribusi.

C. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah

1. Tugas pokok

Tugas pokok Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantaeng yaitu merumuskan, membina, dan mengelolah pendapatan daerah.

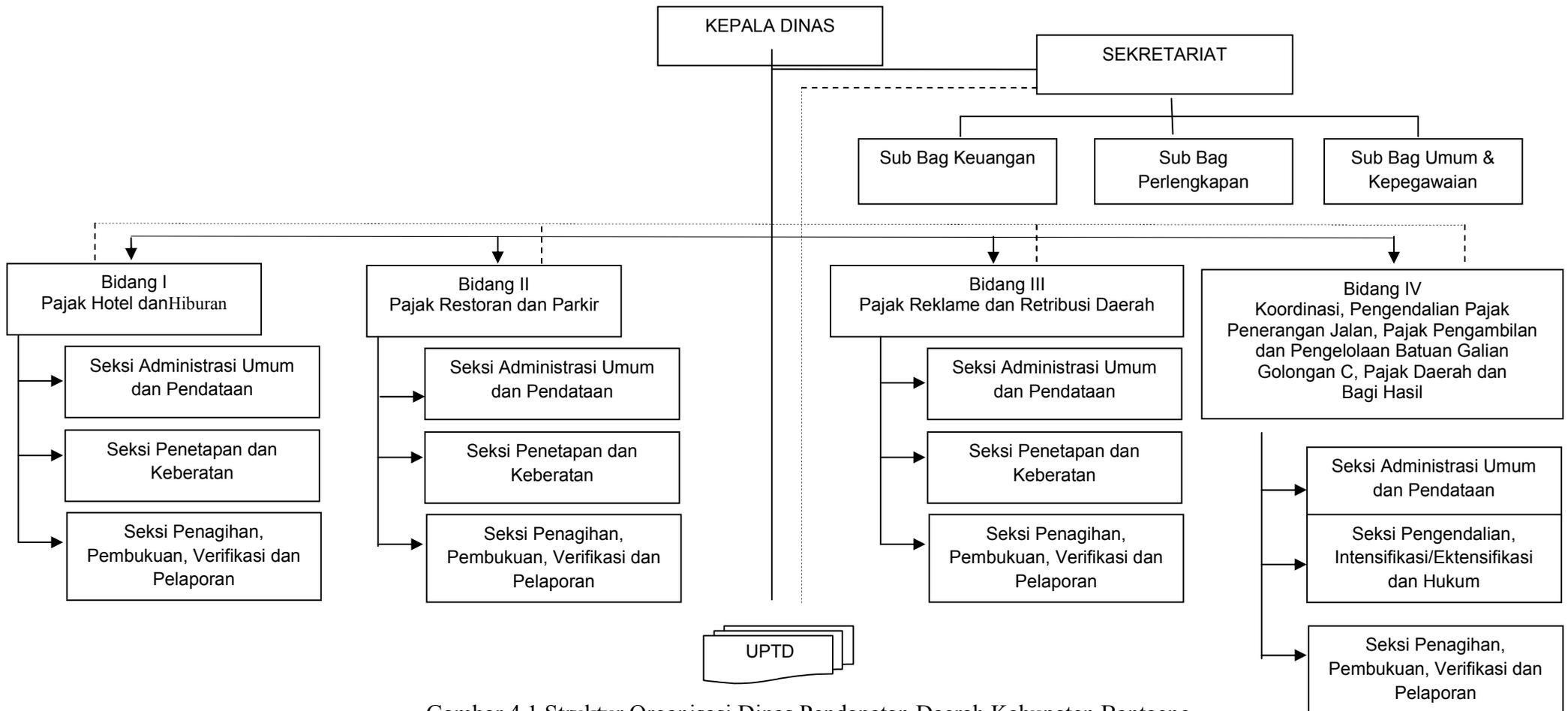
2. Fungsi

Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantaeng, yaitu sebagai berikut.

- a. Penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan serta melakukan pendataan potensi pendapatan daerah.

- b. Penyusunan rencana dan program evaluasi pelaksanaan pungutan pendapatan daerah.
- c. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional bidang pendataan, penetapan, keberatan, dan penagihan serta pembukuan pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak parkir, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengelolaan batuan galian golongan C serta pajak/pendapatan daerah dan retribusi daerah lainnya.
- d. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional bidang bagi hasil dan pendapatan lainnya serta intensifikasi dan ekstensifikasi.
- e. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
- f. Pelaksanaan kesekretariatan dinas;
- g. Pembinaan unit pelaksana teknis.

D. Struktur Organisasi Dispenda Kabupaten Bantaeng



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantaeng

Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dispenda Kabupaten Bantaeng

1. Kepala Dinas

Merencanakan, merumuskan, mengembangkan, mengkoordinasi, dan mengendalikan tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantu di bidangpendapatan.

2. Sekretariat

Sekretariat Dinas dipimpin sekretaris di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Dinas Pendapatan Kabupaten Bantaeng. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengelolaankesekretariatan;
- b. Pelaksanaanurusan kepegawaian dinas;
- c. Pelaksanaanurusan keuangan dan penyusunan neraca SKPD;
- d. Pelaksanaanurusan perlengkapan;
- e. Pelaksanaanurusan umum dan rumah tangga;
- f. Pengkoordinasianperumusan program dan rencana kerja Dinas Pendapatan;

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelolah administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan kerumahtanggaandinas.

Dalam melaksanakan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Mengatur pelaksanaan kegiatan sebagian urusan ketatausahaan meliputi surat-menyurat, kearsipan, surat perjalanan dinas, dan mendistribusikan surat sesuai bidang;
- c. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas;
- d. Melaksanakan usul kenaikan pangkat, mutasi dan pensiun;
- e. Melaksanakan usul gaji berkala, usul tugas belajar dan izin belajar;
- f. Menghimpun dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dalam lingkup dinas;
- g. Menyiapkan bahan penyusunan standarisasi yang meliputi bidang kepegawaian, pelayanan, organisasi dan ketatalaksanaan;
- h. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- i. Melakukan koordinasi pada Sekretariat Korpri Kabupaten Bantaeng;
- j. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

4. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana kerja dan melaksanakan tugas teknis keuangan. Dalam melaksanakan tugas Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana dan program kerja Subbagian Keuangan;
- b. Mengumpulkan dan menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;

- c. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) dari masing-masing Bidang dan Sekretariat sebagai bahan konsultasi perencanaan ke Bappeda melalui Kepala Dinas;
- d. Menyusun realisasi perhitungan anggaran dan administrasi perbendaharaan dinas;
- e. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi dari masing-masing satuan kerja;
- f. Menyusun laporan neraca SKPD dengan melakukan koordinasi dengan Subbagian Perlengkapan;
- g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

5. Subbagian Perlengkapan

Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis perlengkapan, membuat laporan serta mengevaluasi semua pengadaan dan pemanfaatan barang.

Dalam melaksanakan tugas Sub bagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana dan program kerja Dinas Pendapatan;
- b. Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) Dinas;
- c. Membuat usulan Rencana Kerja Kebutuhan Barang Unit (RKBU) Sekretariat dan Bidang-bidang;
- d. Membuat Daftar Kebutuhan Barang (RKB);
- e. Membuat Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU);

- f. Menyusun kebutuhan biaya pemeliharaan untuk tahun anggaran dan bahan penyusunan APBD;
- g. Menerima dan meneliti semua pengadaan barang pada Dinas Pendapatan;
- h. Melakukan penyimpanan dokumen dan surat berharga lainnya tentang barang inventaris daerah;
- i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

6. Bidang I Pajak Hotel dan Hiburan

Bidang I Pajak Hotel dan Hiburan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, pendataan, penetapan, keberatan, penagihan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan. Dalam melaksanakan tugas Bidang I Pajak Hotel dan Hiburan menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- b. Melaksanakan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan, keberatan, penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah, penagihan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan;
- c. Melaksanakan pembinaan sistem manajemen Pengelolaan Pajak;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- e. Pengelolaan administrasi urusan tertentu.

7. Bidang II Pajak Restoran dan Parkir.

Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, pendataan, penetapan, keberatan, penagihan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan

Pajak Restoran dan Pajak Parkir. Dalam melaksanakan tugas, Bidang II Pajak Restoran dan Pajak Parkir menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- b. Melaksanakan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan, keberatan, penerbitan surat ketetapan pajak daerah, penagihan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak Restoran dan Pajak Parkir;
- c. Melaksanakan pembinaan sistem manajemen Pengelolaan Pajak;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- e. Pengelolaan administrasi urusan tertentu.

8. Bidang III Pajak hiburan dan Retribusi Daerah

Bidang III Pajak hiburan dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, pendataan, penetapan, keberatan, penagihan, pembukuan dan pelaporan Pajak hiburan dan Retribusi Daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang III Pajak hiburan dan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- b. Melaksanakan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan, keberatan, penerbitan surat ketetapan pajak daerah, penagihan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak hiburan dan Retribusi Daerah;
- c. Melaksanakan pembinaan sistem manajemen Pengelolaan Pajak;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- e. Pengelolaan administrasi urusan tertentu.

9. Bidang IV Koordinasi, Pengendalian Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Batuan Galian Golongan C, Pajak Daerah dan Bagi Hasil

Bidang IV Koordinasi, Pengendalian Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Batuan Galian Golongan C, Pajak Daerah dan Bagi Hasil mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok mengendalikan, merencanakan, merumuskan serta melakukan pengembangan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan serta audit pajak dan retribusi.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang IV Koordinasi, Pengendalian Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Batuan Galian Golongan C, Pajak Daerah dan Bagi Hasil menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- b. Koordinasi dan pengendalian intensifikasi dan ekstensifikasi;
- c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak-pajak dan retribusi;
- d. Koordinasi dan pengendalian bagi hasil dan pajak daerah lainnya;
- e. Pengendalian, pelaporan dan verifikasi;
- f. Melaksanakan koordinasi antara seksi yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
- h. Pengelolaan administrasi urusan tertentu.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Pemungutan Pajak Bumi Bangunan di Kabupaten Bantaeng

1. Pelaksanaan pemungutan PBB

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.1002/KMK.04/1995 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan PBB kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan atau Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II, Pemerintah Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk memungut PBB. Di Kabupaten Bantaeng kewenangan tersebut kemudian ditugaskan kepada Dipenda sebagai koordinator pemungutan pendapatan daerah untuk melaksanakan tugas pemungutan PBB. Tugas Dipenda yang dilaksanakan selama ini meliputi membantu pendataan, perencanaan target anggaran, menyampaikan SPPT dan dokumentasi PBB lainnya, pemungutan PBB, pelaporan realisasi PBB serta pengendalian dan pengawasannya.

Dinas pendapatan daerah memiliki tim pelaksanaan pemungutan PBB yang terdiri dari tingkat kecamatan hingga desa, tim pemungutan PBB ini merupakan tim kerjasama lintas sektoral sehingga dengan kerjasama lintas sektoral ini diharapkan pelaksanaan pemungutan PBB dapat berjalan efektif dan efisien.

2. Pendataan Objek dan Subjek PBB

Pendataan adalah semua kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi, dan menatausahakan data objek dan subjek PBB. Pendataan ini dilakukan oleh aparat pusat yang ada di daerah yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang dibantu oleh Dipenda dalam pelaksanaannya. Prosedur pendataan

objek dan subjek PBB secara nasional yaitu dengan Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP), yang dilakukan dengan cara :

- a) Pendaftaran objek dan subjek PBB oleh wajib pajak dengan mengisi SPOP dan melaporkannya kepada KPP Pratama
- b) Pendaftaran objek dan subjek pajak oleh KPP Pratama

3. Penetapan dan Penagihan PBB

Kewenangan penetapan PBB dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Bantaeng. Perhitungan besarnya PBB didasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan dengan adanya pokok massal yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pokok massal adalah jumlah ketetapan awal tahun.

Pemberitahuan besarnya ketetapan PBB untuk masing-masing wajib pajak dilakukan dengan penerbitan SPPT. Distribusi SPPT tersebut dilakukan oleh KPP Pratama kepada wajib pajak melalui Dipenda Kabupaten Bantaeng. Dipenda selanjutnya membagikannya kepada para camat untuk diteruskan kepada para kepala Desa/ Kelurahan untuk dibagikan kepada Wajib Pajak di Desa masing-masing.

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Dasar Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan adalah :

- a) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)

- b) Surat Ketetapan Pajak (SKP)
- c) Surat Tagihan Pajak (STP)
- d) Pelaksanaan Penagihan

Kepala Kantor Pelayanan PBB atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama dapat melaksanakan tindakan penagihan PBB apabila pajak yang terutang sebagaimana tercantum dalam STP PBB tidak atau kurang dibayar setelah lewat jatuh tempo pembayaran. Penerbitan Surat Teguran (ST) sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilakukan segera setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. Setelah lewat waktu 21 hari sejak diterbitkannya ST, jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak, Kepala KPPBB atau Kepala KPP Pratama segera menerbitkan Surat Paksa (SP). Setelah lewat waktu 2x24 jam sejak Surat Paksa (SP) diberitahukan kepada Penanggung Pajak, jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak,

Kepala Kantor Pelayanan Pajak segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP). Setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, apabila utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak, Kepala Kantor Pelayanan Pajak segera melaksanakan Pengumuman Lelang (PL).

Setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman lelang, apabila utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak, Kepala Kantor Pelayanan Pajak segera melaksanakan penjualan barang sitaan Penanggung Pajak melalui Kantor Lelang. Dalam hal dilakukan penagihan seketika dan sekaligus,

kepada penanggung pajak dapat diterbitkan SP tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran atau tanpa menunggu lewat tenggang waktu 21 hari sejak ST diterbitkan.

4. Pembayaran PBB

Jangka waktu pembayaran PBB adalah 6 bulan sejak diterbitkannya SPPT/PBB pembayaran dilaksanakan satu kali dan tidak ada sistem angsuran. Pembayaran yang melewati masa jatuh tempo akan dibuatkan surat tagihan yang jumlah ketetapan pajaknya antara Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,-, dan jika surat tagihan tidak ditanggapi maka petugas dari Dipenda akan mendatangi wajib pajak (*door to door*).

Sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan No.249/KMK.04/1999 tentang penunjukan Tempat pembayaran dan Tata cara Pembayaran PBB pembayaran PBB dilakukan di tempat-tempat yang telah ditetapkan dalam SPPT/PBB. Tempat-tempat tersebut antara lain bank, pos dan giro, atau tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri keuangan. Sistem pembayaran itu dikenal dengan Sistem Tempat Pembayaran (SISTEP). Maksud dan tujuan dari SISTEP ini adalah :

- a) Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak
- b) Menertibkan administrasi
- c) Mempermudah pengawasan
- d) Mempermudah penerapan sanksi
- e) Mempercepat perhitungan tunggakan

Mekanisme pembayaran PBB di Kabupaten Bantaeng ini dapat dijelaskan sebagai berikut Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Daftar

Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP), dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS). SPPT merupakan surat penagihan kepada wajib pajak mengenai jumlah besarnya ketetapan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, DHKP dibuat rangkap tiga yang berfungsi sebagai alat kontrol, STTS dibuat rangkap empat didistribusikan kepada pihak bank-bank dan Dipenda untuk dijadikan alat bukti pembayaran dan nanti satunya akan dikirimke pusat. Sistem pembayarannya bersifat online sehingga wajib pajak bisa membayar lewat bank yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Bantaeng, dalam hal ini adalah Bank BPD.

B. Efektivitas Pembayaran Pajak (PBB) Terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantaeng

Efektifitas atau hasil guna pajak adalah mengukur hubungan antara hasil pungut suatu pajak dan potensi hasil pajak itu, dengan anggapan semua wajib pajak membayar pajak masing-masing, dan membayar seluruh pajak terhutang masing-masing. Dalam pembahasan ini, pengukuran efektifitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan menggunakan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100\%$$

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan PBB Kabupaten Bantaeng 2014

No	Kecamatan	Target Operasional	Total Penerimaan	%
1	Bissapu	464,999,900	418,430,961	89.2
2	Uluere	294,854,407	248,901,335	84.5
3	Sinoa	266,981,484	230,540,065	86.6
4	Bantaeng	246,227,903	245,251,422	99.4
5	Emerasa	260,037,090	243,980,214	93.2
6	Tompobulu	281,036,905	230,785,602	82.3
7	Pajukukang	200,400,021	253,846,544	126.7
8	Gantarangkeke	273,058,797	266,858,172	97.2
Jumlah		2,287,596,507	2,138,594,315	

Sumber: Data Keuangan Dispenda Kab Bantaeng

Dari hasil data yang di peroleh diatas, penulis menyikapi bahwa, rata- rata dari hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yaitu 95,8% dari jumlah keseluruhan yang di peroleh setiap Kecamatan di Kabupaten Bantaeng, dalam mengefisienkan pemungutan pajak untuk daerah Kabupaten Bantaeng khususnya pajak bumi dan bangunan, dispenda Kabupaten Bantaeng, melakukan kerja sama dengan pihak kecamatan dan kelurahan dalam proses pendaftaran dan penyeteroran SPT dan disetorkan kembali ke Dispenda serta Dispenda yang memberikan pegawai ke setiap kecamatan untuk memonitoring semua yang terjadi disetiap kecamatan, Dengan adanya peraturan yang baru ini bagaimana peran dispenda, terhadap pengguna

wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya baik itu dari pendaftaran dan penyeteroran SPT, jika dilihat dari data realisasi anggaran di tahun 2014 ini.

Berdasarkan perhitungan efektifitas pemungutan pajak bumi dan bangunan yang diselenggarakan oleh Dinas Pedapatan Daerah Kabupaten Bantaeng terhadap kinerja pegawai menunjukkan bahwa dari kedelapan kecamatan di Kabupaten Bantaeng terlihat bahwa di Kecamatan Bantaeng yang realisasi penerimaan PBB mencapai 100% yakni Kecamatan Pajukukang sebesar 126%, dan Kecamatan Bantaeng hampir 100% yakni 99,4%, diikuti oleh Kecamatan Gantarangkeke sebesar 97,2%, Selanjutnya Kecamatan Emerasadengan besaran realisasi 93,2% dari target penerimaan PBB.

Sedangkan di Kecamatan Bissapi sendiri tingkat realisasi penerimaan PBB hanya mencapai 80,2%, selanjutnya diikuti oleh Kecamatan Ulueresebesar 84,5%, Kecamatan Sinoasebesar 86,6%, dan Kecamatan Tompobulusebesar 82,3%.

Pencapaian penerimaan pajak bumi dan bangunan yang terealisasi cukup menunjukkan bahwa kinerja pegawai dalam menerapkan sistem penerimaan pajak efektif. hal tersebut diwakilkan dengan tidak adanya realisasi penerimaan dibawah 50%. Dengan adanya peningkatan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan tentunya memberikan pengaruh terhadap pendapatan asli daerah dikategorikan sangat baik apabila rasio yang dicapai diatas 50%. Dari hasil perhitungan ini kontribusi terbesar diberikan oleh Kecamatan Pajukukang yaitu sebesar 126,7% yang menurut kriteria berarti sangat baik. Berikut target dan realisasi penerimaan PBB Kabupaten Bantaeng tahun periode 2015.

Tabel 2. Target dan Realisasi Penerimaan PBB Kabupaten Bantaeng 2015

No	Kecamatan	Target Operasional	Total Penerimaan	%
1	Bissapu	336,871,503	387,911,755	115.1
2	Uluere	316,994,373	324,350,568	102.1
3	Sinoa	213,150,200	203,644,513	95.54
4	Bantaeng	397,808,701	498,404,995	125.4
5	Emerasa	357,884,603	338,409,400	94.2
6	Tompobulu	281,036,905	330,785,602	117.2
7	Pajukukang	325,400,245	293,846,544	90.1
8	Gantarangkeke	221,058,699	366,858,172	105.5
Jumlah		2,450,205,229	2,654,211,549	

Sumber: Data Keuangan Dispenda Kab Bantaeng

Berdasarkan perhitungan efektifitas pemungutan pajak bumi dan bangunan yang diselenggarakan oleh Dinas Pedapatan Daerah Kabupaten Bantaeng terhadap kinerja pegawai menunjukkan bahwa dari kedelapan kecamatan di Kabupaten Bantaeng terlihat bahwa di Kecamatan Bantaeng yang realisasi penerimaan PBB mencapai 100% yakni 126%, diikuti oleh Kecamatan Tompobulu sebesar 117,2%, Selanjutnya Kecamatan Bissapu dengan besaran realisasi 115,1% dari target penerimaan PBB.

Sedangkan di Kecamatan Uluere tingkat realisasi penerimaan PBB mencapai 102,1%, selanjutnya diikuti oleh Kecamatan Gantarangkekes sebesar 102,4%, Kecamatan Sinoasebesar 95,4%, dan Kecamatan Emerasasebesar 94,2%,

serta Kecamatan Pajukukang yang paling sedikit realisasi penerimaan PBB yang mencapai 90,1%.

Adanya peningkatan kontribusi PBB terhadap pendapatn daerah yang berarti Pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam meningkatkan kemampuannya untuk membiayai pembangunan daerah dari pajak bumi dan bangunan semakin meningkat. Keberhasilan untuk meningkatkan prosentase kontribusi merupakan kerja keras dari pemungut terutama dari pihak Dinas Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugasnya.

Pemerintah memiliki kriteria tentang wajib pajak patuh. Dasar hukum penetapan kriteria wajib pajak patuh ini adalah Undang-undang No. 16 tahun 2000 mengenai ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kriteria ini ditetapkan dengan tujuan untuk memotivasi para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya serta meningkatkan jumlah wajib pajak patuh. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak, maka sulit bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Pemerintah khususnya di Kabupaten Bantaeng telah melakukan upaya untuk menambahkan pengetahuan bagi para wajib pajak, diantaranya melalui penyuluhan dengan tujuan agar para wajib pajak lebih mudah mengerti dan lebih cepat mendapat informasi perpajakan. Informasi perpajakan tersebut tidak hanya berisi tentang kewajiban wajib pajak, namun juga terdapat penjelasan tentang pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak juga menjadi peranan penting terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Pelayanan yang baik yang diberikan oleh petugas pajak diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Oleh karena itu, petugas pajak dituntut untuk memberikan pelayanan yang ramah, adil, dan tegas setiap saat kepada wajib pajak serta dapat memupuk kesadaran tentang tanggungjawab membayar pajak.

Dalam upaya efektivitas pemungutan PBB faktor penyuluhan merupakan salah satu faktor penunjang dan diharapkan masyarakat ataupun wajib pajak PBB dapat menumbuh kembangkan partisipasi dan kesadaran masyarakat atau wajib pajak. Faktor penyuluhan sudah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantaeng secara intensif dengan memberikan informasi atau keterangan tentang pajak bumi dan bangunan. Di Kabupaten Bantaeng penyuluhan ini telah dilaksanakan dengan menggandeng PKK, iklan di media elektronik diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang PBB sehingga dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar PBB tepat waktunya.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan perhitungan efektifitas pemungutan pajak bumi dan bangunan yang diselenggarakan oleh Dinas Pedapatan Daerah Kabupaten Bantaeng terhadap kinerja pegawai menunjukkan bahwa dari kedelapan kecamatan di Kabupaten Bantaeng terlihat bahwa terjadi peningkatan penerimaan pajak yang ditunjukkan oleh penerimaan tahun 2014 ke tahun 2015 dimana rata-rata penerimaan setiap Kecamatan mengalami kenaikan penerimaan tahun 2014 sebesar 89% yakni tahun 2014 rata-rata penerimaan 95,2% dan meningkat pada tahun 2015 menjadi 110,5%.

Pencapaian penerimaan pajak bumi dan bangunan yang terealisasi cukup menunjukkan bahwa kinerja pegawai dalam menerapkan sistem penerimaan pajak efektif. Hal tersebut diwakilkan dengan tidak adanya realisasi penerimaan dibawah 50%. Dengan adanya peningkatan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan tentunya memberikan pengaruh terhadap pendapatan asli daerah dikategorikan sangat baik apabila rasio yang dicapai diatas 50%. Dari hasil perhitungan ini kontribusi terbesar diberikan oleh Kecamatan Bissapuyaitu sebesar 102,7% yang menurut kriteria berarti sangat baik.

B. Saran

1. Mengharapkan Dispenda Kabupaten Bantaeng memberikan pelatihan untuk semua pegawai dalam hal penilaian dan proses pengimputan data, jika

terjadi ketimpangan dalam hal pengelolaan data untuk pembukuan akhir tahun

2. Memaksimalkan SDM untuk mempermudah kerja lapangan dalam hal memonitoring setiap kendala yang terjadi di setiap kecamatan tersebut.
3. Memperkuat sistem informasi baik dari kelurahan dan kecamatan itu sendiri, agar penyeteroran spt yang di anggap penting bisa lebih dimaksimalkan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alannita dan I Gusti. 2014. *Perpajakan Indonesia: Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*. Jakarta : Penerbit Andi.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Bina Aksara.
- Hani Handoko. 2007. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE
- Hasibuan, Malayu. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi*. Bumi Aksara, Jakarta
- Lisdawati dan Irma, 2012. *Pengantar Bisnis, Edisi Pertama*. Yogyakarta/ Penerbit Andi
- Mardiasmo. 2010. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta
- Marsyahrul. 2006
- Mulyadi. 2013. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. RajaGrafindo Persada. Jakarta
- Mulyono. 2002. *Tax Planning-Menyiasati Pajak dengan Bijak*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nurmantu Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Murti Sumarni. 2006. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: PT Grasindo
- Richard M. Steers. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT Elexmedia
- Stephen P. Robbins. 2002. *Perilaku dan Manajemen Organisasi*, ed 7, Erlangga
- Sulaiman, Anwar. 2000. *Pengantar Keuangan Negara dan Daerah*, STIA-LAN Press : Jakarta
- Sumarsan. 2010. *Perpajakan Indonesia*, PT. Indeks, Jakarta
- Sutrisno, Hadi. 2001. *Manajemen Keuangan*, Ekonesia: Yogyakarta

Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang No 25 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 2031/Izn-05/C.4-VIII/ VIII/37/2016
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian

3 Dzulqo'dah 1437 H
06 Agustus 2016 M

Kepada Yth,
Bapak / Ibu Bupati Bantaeng
Cq. Ka. Badan Kesbang, Politik & Linmas
di –
Bantaeng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 359/05/A.1-VIII/VII/1437H/2016 tanggal 21 Juni 2016, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **SUGIATI K.**
No. Stambuk : **105 72 04006 12**
Fakultas : **Fakultas Ekonomi dan Bisnis**
Jurusan : **Manajemen**
Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

“Efektivitas Prosedur Pembayaran Pajak Terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantaeng.”

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 9 Agustus s/d 9 Oktober 2016.

dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua,
Jb. Sekretaris LP3M,



Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
NBM 101 7716



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 359/05/C.4-II/VI/37/2016
Lamp. : -
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

16 Ramadhan 1437 H.
21 Juni 2016M.

Kepada Yth.
Ketua LP3M Unismuh Makassar
di-
Makassar

Dengan hormat,

Dalam rangka proses penelitian dan penulisan skripsi mahasiswa di bawah ini :

N a m a : **Sugiati K.**
Stambuk : 10572 04006 12
Jurusan : Manajemen
Judul Penelitian : ***Efektivitas Prosedur Pembayaran Pajak Terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantaeng***

Dimohon kiranya mahasiswa tersebut dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai dengan jadwal penelitian di tempat Bapak.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

Dekan ,
U.b Wakil Dekan I,

Drs. H. Sultan Sarda, MM
NBM. 103 0311,-

Tembusan :

1. Rektor Unismuh Makassar
2. Ketua Jurusan masing-masing
3. Mahasiswa Ybs.

Arsip



Nomor : 2031/Izn-05/C.4-VIII/ VIII/37/2016

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

Hal : Permohonan Izin Penelitian

3 Dzulqo'dah 1437 H

06 Agustus 2016 M

Kepada Yth,

Bapak / Ibu Bupati Bantaeng

Cq. Ka. Badan Kesbang, Politik & Linmas

di -

Bantaeng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 359/05/A.1-VIII/VII/1437H/2016 tanggal 21 Juni 2016, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : SUGIATI K.
No. Stambuk : 105 72 04006 12
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Manajemen
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

“Efektivitas Prosedur Pembayaran Pajak Terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantaeng.”

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 9 Agustus s/d 9 Oktober 2016.

dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua,
Sekretaris LP3M,




M. I. Abubakar Idhan, MP.
NBM 101 7716



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

No. 75/02/A.4-II/IX/35/2016

Tentang

PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIV. MUHAMMADIYAH MAKASSAR

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS Universitas Muhammadiyah Makassar, setelah :

- Menimbang : 1. Untuk tertib administrasi dalam penulisan dan penyusunan skripsi mahasiswa dilingkungan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unismuh Makassar dipandang perlu mengeluarkan surat keputusan untuk dosen pembimbing.
2. Untuk maksud diatas, maka perlu diatur dalam satu surat keputusan.
- Mengingat : 1. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 1999
2. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar 2001
3. Peraturan yang berlaku di lingkungan Univ. Muhammadiyah Makassar
- Memperhatikan : Usulan KaprodiManajemen, pada tanggal 03 Februari 2016 M.

Dengan memohon inayah Allah Swt,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat dosen pembimbing skripsi mahasiswa:

Nama	: Sugianti K
Stambuk	: 105720400612
Program Studi	: Manajemen
Pembimbing I	: Drs. H. Sultan Sarda, MM
Pembimbing II	: Irianto Sulaeman, SE., MM

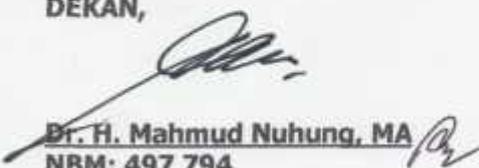
JudulSkripsi : Efektivitas Manajemen Pembayaran Pajak Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantaeng.

- Kedua : Seluruh pembiayaan menyangkut dosen pembimbing dan penguji dibebankan berdasarkan peraturan yang berlaku di lingkungan Unismuh Makassar.
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah yudisium mahasiswa yang bersangkutan.
- Keempat : Surat keputusan ini akan diperbaiki atau ditinjau kembali, apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 03 Februari 2016

DEKAN,


Dr. H. Mahmud Nuhung, MA
NBM: 497 794

Tembusan :

1. Rektor Unismuh Makassar
2. Kaprodi di lingkungan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
3. Masing-masing mahasiswa



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN & ASET DAERAH**

Alamat : Jalan A. Mannappiang No. 5 Telp. (0413)- 21480 Bantaeng

Bantaeng, 17 September 2016

Nomor : 970/501/DPPKAD/IX/2016

Lamp :

Perihal : Bukti Penelitian

K e p a d a

Yth. DEKAN FAKULTAS EKONOMI

JURUSAN MANAJEMEN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH

MAKASSAR

Di-

T e m p a t

Dengan hormat,

Berdasarkan surat Badan kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kab. Bantaeng No. 200/V.22/428/VIII/2016 Tanggal. 10 Agustus 2016 Perihal : Rekomendasi Penelitian, maka disampaikan bahwa yang namanya tersebut di bawah ini :

Nama : **SUGIATI. K**
Tempat/Tanggal Lahir : Tarowang, 01 Januari 1986
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jeneponto

Benar telah melaksanakan pengambilan Data di Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bantaeng. Dalam rangka menyusun Skripsi dengan Judul : "EFEKTIVITAS PROSEDUR PEMBAYARAN PAJAK TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG"
Penyampaian kami untuk menjadi bahan seperlunya.

Pic. KEPALA DINAS



Ir. NUR IDA SITABA, M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP : 19670824 199303 2 009

Lampiran I
PERSURATAN

Lampiran II
DOKUMENTASI

